

Optimalisasi Satresnarkoba Polresta Manokwari dalam Upaya Pemberantasan Peredaran Narkoba: Tinjauan Strategis dan Implementasi Kebijakan

Tiara Paulin Tuani Dame Sitorus
Universitas Airlangga, Indonesia
Email: tiarapaulin28@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji optimalisasi Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Manokwari dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba melalui tinjauan strategis dan implementasi kebijakan. Permasalahan peredaran narkoba yang semakin kompleks menuntut Satresnarkoba untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugasnya. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif untuk mengidentifikasi tantangan, strategi, dan kebijakan yang diterapkan dalam pemberantasan narkoba di wilayah Manokwari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satresnarkoba menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, teknologi yang belum optimal, serta kurangnya koordinasi antar lembaga terkait. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan penguatan kapasitas personel melalui pelatihan intensif, pemanfaatan teknologi informasi untuk pengawasan dan pelacakan, serta peningkatan sinergi antar instansi pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat. Selain itu, implementasi kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap kondisi lapangan sangat penting untuk mendukung keberhasilan pemberantasan narkoba. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan regulasi internal, peningkatan anggaran operasional, dan pengembangan sistem evaluasi kinerja yang transparan dan akuntabel. Pendekatan preventif melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi bagian integral dalam mengurangi permintaan narkoba. Dengan mengintegrasikan strategi yang matang dan kebijakan yang efektif, Satresnarkoba Polresta Manokwari dapat mengoptimalkan perannya dalam memberantas peredaran narkoba, sehingga memberikan dampak positif bagi keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Optimalisasi Satresnarkoba, Tinjauan Strategis, Implementasi Kebijakan

ABSTRACT

This research aims to examine the optimization of the Manokwari Police Drug Investigation Unit (Satresnarkoba) in an effort to eradicate drug trafficking through strategic review and policy implementation. The increasingly complex problem of drug trafficking requires the Narcotics Task Force to increase the effectiveness and efficiency in carrying out its duties. This study uses a qualitative approach with descriptive analysis to identify challenges, strategies, and policies implemented in drug eradication in the Manokwari region. The results of the study show that the Satresnarkoba faces various obstacles, such as limited human resources, suboptimal technology, and lack of coordination between related institutions. To overcome this, it is necessary to strengthen the capacity of personnel through intensive training, the use of information technology for supervision and tracking, and increase synergy between government agencies, the community, and non-governmental organizations. In addition, the implementation of policies that are adaptive and responsive to field conditions is very important to support the success of drug eradication. This study recommends internal regulatory reforms, increased operational budgets, and the development of a transparent and accountable performance evaluation system. Preventive approaches through education and socialization to the community are also an integral part of reducing drug demand. By integrating a mature strategy and effective policies, the Manokwari Police Narcotics Task Force can

optimize its role in eradicating drug trafficking, thereby having a positive impact on the safety and welfare of the community.

Keywords: Optimization of Drug Task Force, Strategic Review, Policy Implementation

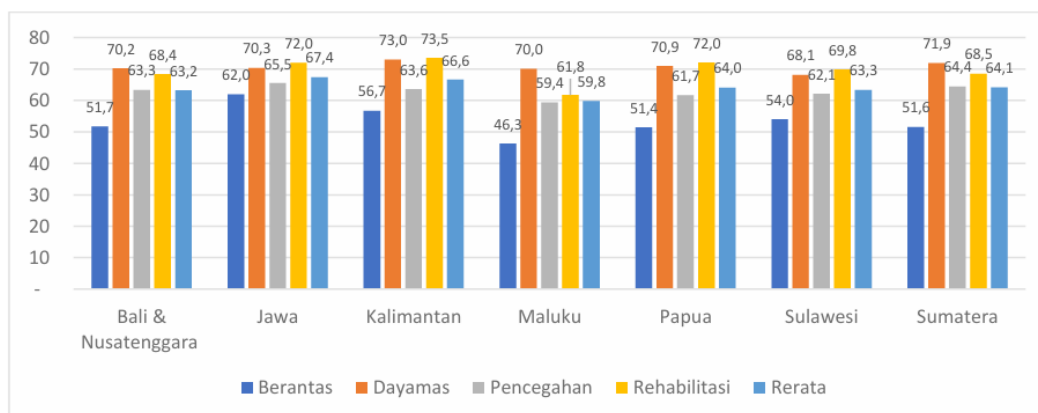
**Correspondence Author: Tiara Paulin Tuani Dame Sitorus
Email: tiarapaulin28@gmail.com*



PENDAHULUAN

Peredaran narkoba di Indonesia telah menjadi salah satu ancaman serius yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat secara menyeluruh (Hariyanto, 2018; S Gabriella, 2019). Dampak negatif narkoba tidak hanya terbatas pada kesehatan fisik dan mental individu yang mengonsumsinya, tetapi juga meluas ke ranah sosial, ekonomi, dan keamanan nasional (Isvany et al., 2024). Dari sisi kesehatan, penyalahgunaan narkoba menyebabkan berbagai gangguan kesehatan kronis, kecanduan, serta peningkatan risiko penyakit menular yang membebani sistem pelayanan kesehatan (Putra & Gaol, 2025). Secara sosial, peredaran narkoba memicu meningkatnya angka kriminalitas, disintegrasi keluarga, dan menurunnya produktivitas masyarakat (Haifa & Oktaviana, 2024). Selain itu, narkoba juga menjadi faktor pemicu konflik sosial dan kerusuhan yang dapat mengancam stabilitas keamanan di tingkat lokal maupun nasional (Nugroho et al., 2025). Oleh karena itu, peredaran narkoba tidak hanya menjadi persoalan individu, melainkan juga masalah kolektif yang memerlukan perhatian dan penanganan serius dari seluruh elemen bangsa, termasuk aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat luas.

Kota Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat, tidak luput dari permasalahan ini (Indou, 2022). Letak geografisnya yang strategis menjadikan Manokwari sebagai salah satu wilayah rawan masuknya peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang (Djangoan & Dominggus, 2021). Kondisi ini menuntut adanya upaya serius dan terstruktur dari aparat penegak hukum untuk mengatasi permasalahan tersebut (Haspada, 2023). Adapun data angka indeks Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) tahun 2024 berdasarkan kedeputian dan wilayah regional jumlah kasus narkoba di beberapa provinsi Indonesia :



Gambar 1. Angka Indeks P4GN menurut Pulau & Kedeputian, 2024

Sumber : BNN 2024

Kinerja tiap bidang di berbagai pulau bervariasi signifikan. Bidang Pemberantasan memiliki nilai terendah, terutama di Maluku (46,3), Bali & Nusa Tenggara (51,7), dan Sumatera (51,6), menunjukkan perlunya peningkatan strategi (Rocky Marbun et al., 2021). Sebaliknya, Pemberdayaan Masyarakat menunjukkan hasil baik, dengan Kalimantan tertinggi (73,0), diikuti Sumatera (71,9) dan Papua (70,9) (Ufnia & Hendrayanti, 2023). Bidang Pencegahan stabil di semua wilayah, tertinggi di Jawa (65,5), Sumatera (64,4), dan Kalimantan (63,6), sementara Maluku lebih rendah (59,4) tapi tetap stabil (Tadjoeddin et al., 2017). Bidang Rehabilitasi juga baik, dengan Kalimantan tertinggi (73,5) dan Maluku cukup baik (61,8) meski rata-rata wilayahnya rendah.

Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Manokwari memiliki optimalisasi vital dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah ini (Aini, 2021). Sebagai garda terdepan, Satresnarkoba bertanggung jawab melakukan penyelidikan, penindakan, dan pencegahan terhadap jaringan narkoba yang beroperasi (Marwenny, 2024). Namun, kompleksitas permasalahan narkoba menuntut pendekatan yang tidak hanya bersifat represif, melainkan juga strategis dan terintegrasi dengan kebijakan yang efektif.

Pemberantasan narkoba tidak dapat dilakukan secara parsial atau hanya mengandalkan tindakan penegakan hukum semata. Diperlukan strategi yang komprehensif yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari pencegahan, rehabilitasi, hingga pemberdayaan masyarakat (Nurmalita & Megawati, 2022; W. T. Prayugo et al., 2025). Dalam konteks ini, Satresnarkoba Polresta Manokwari harus mampu merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan dinamika sosial yang ada.

Wilayah Manokwari memiliki karakteristik geografis yang unik dengan kombinasi pegunungan, hutan tropis lebat, dan garis pantai yang panjang di pesisir Teluk Doreh (Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat, 2023). Kondisi alam yang masih asri dan relatif terpencil menjadikan Manokwari sebagai daerah dengan keanekaragaman hayati yang tinggi serta budaya masyarakat yang beragam, terutama suku-suku asli Papua. Secara demografis, Manokwari mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup pesat akibat urbanisasi dan perkembangan ekonomi, terutama di sektor pemerintahan, pendidikan, dan pariwisata (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2022). Namun, keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan wilayah ini. Selain itu, posisi strategis Manokwari sebagai pintu gerbang menuju wilayah Papua Barat menjadikannya pusat aktivitas sosial, ekonomi, dan keamanan yang penting, sekaligus rawan terhadap berbagai permasalahan sosial, termasuk peredaran narkoba. Karakteristik ini menuntut pendekatan khusus dalam pengelolaan sumber daya dan penanganan masalah sosial di wilayah tersebut.

Tinjauan strategis menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana Satresnarkoba mengelola sumber daya, merumuskan langkah-langkah operasional, serta mengantisipasi berbagai tantangan yang muncul dalam pemberantasan narkoba (Lukman et al., 2022; Putri Amelia & Wibowo, 2023; Sefrika, 2016). Strategi yang tepat akan meningkatkan efektivitas penindakan dan meminimalisir celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan narkotika.

Selain itu implementasi kebijakan yang konsisten dan adaptif juga menjadi kunci keberhasilan. Kebijakan yang dibuat oleh institusi kepolisian harus dapat diterjemahkan ke dalam tindakan nyata di lapangan, dengan memperhatikan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi

masyarakat Manokwari. Hal ini penting agar kebijakan tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar memberikan dampak positif.

Optimalisasi Satresnarkoba juga tidak dapat dilepaskan dari sinergi dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, lembaga sosial, dan komunitas masyarakat. Kolaborasi ini diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Keterlibatan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mengurangi permintaan dan penyebaran narkoba. Adapun data dari kasus penanganan kasus narkoba di wilayah hukum Satresnarkoba Polresta Manokwari tahun 2021-2024:

Tabel 1. kasus narkoba di wilayah hukum Satresnarkoba Polresta Manokwari tahun 2021-2024

NO	TAHUN	TAHAP P21	SP 3	JUMLAH KASUS MASUK
1.	2021	16	3	19
2.	2022	21	0	21
3.	2023	16	1	17
4.	2024	11	4	15

Sumber : Satresnarkoba Polresta Manokwari

Data kasus narkoba di wilayah hukum Satresnarkoba Polresta Manokwari selama periode 2021 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi jumlah kasus yang masuk setiap tahunnya. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 19 kasus, dengan 16 kasus telah mencapai tahap P21 (berkas perkara dinyatakan lengkap) dan 3 kasus berada pada tahap SP3 (surat perintah penghentian penyidikan). Tahun 2022 mengalami peningkatan jumlah kasus menjadi 21, di mana seluruh kasus tersebut telah mencapai tahap P21 tanpa adanya kasus yang dihentikan pada tahap SP3. Pada tahun 2023, jumlah kasus menurun menjadi 17, dengan 16 kasus di tahap P21 dan 1 kasus di tahap SP3. Selanjutnya, pada tahun 2024, jumlah kasus kembali menurun menjadi 15, dengan 11 kasus di tahap P21 dan 4 kasus di tahap SP3. Tren ini menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus narkoba yang masuk ke Satresnarkoba Polresta Manokwari dalam beberapa tahun terakhir, meskipun terdapat variasi dalam penyelesaian kasus di tahap penyidikan.

Tantangan yang dihadapi Satresnarkoba Polresta Manokwari cukup kompleks. Selain keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, jaringan narkoba yang semakin canggih dan tersebar luas membuat tugas pemberantasan menjadi semakin berat. Pelaku kejahatan narkoba juga seringkali menggunakan berbagai modus ooptimalisasidi untuk mengelabui aparat penegak hukum.

Penelitian terdahulu mengenai pemberantasan narkoba telah banyak dilakukan, namun masih terdapat beberapa celah penelitian yang perlu diisi. Studi oleh Hidayat (2020) lebih berfokus pada strategi pemberantasan narkoba di wilayah perbatasan, sementara penelitian Kurniawan & Sari (2021) mengkaji implementasi kebijakan di tingkat kepolisian daerah secara umum tanpa spesifikasi wilayah. Penelitian Mulyadi (2019) tentang optimalisasi kepolisian juga belum menyentuh aspek integrasi antara tinjauan strategis dan implementasi kebijakan secara komprehensif. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan holistik yang mengintegrasikan analisis strategis dengan evaluasi implementasi kebijakan secara spesifik di Satresnarkoba Polresta Manokwari, dengan mempertimbangkan karakteristik geografis dan sosial budaya Papua Barat yang unik. Studi ini mengisi gap penelitian dengan menyajikan

analisis komprehensif mengenai optimalisasi Satresnarkoba dalam konteks lokal yang spesifik, yang belum banyak diteliti sebelumnya.

Oleh karena itu pendekatan yang dilakukan harus bersifat multidimensional dan inovatif. Satresnarkoba perlu mengembangkan metode kerja yang adaptif terhadap perkembangan modus kejahatan serta memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung operasi pemberantasan narkoba. Pendekatan ini juga harus didukung oleh kebijakan yang responsif dan berorientasi pada hasil. Kajian mendalam mengenai optimalisasi Satresnarkoba Polresta Manokwari dalam konteks strategi dan implementasi kebijakan sangat diperlukan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas upaya yang telah dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi dalam pemberantasan narkoba di wilayah tersebut.

Dengan pemahaman yang komprehensif, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi yang tepat untuk meningkatkan kinerja Satresnarkoba. Rekomendasi ini dapat berupa perbaikan strategi operasional, peningkatan kapasitas sumber daya, serta penguatan kebijakan yang mendukung pemberantasan narkoba secara berkelanjutan.

Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana kebijakan yang ada di tingkat nasional dan daerah diimplementasikan oleh Satresnarkoba Polresta Manokwari. Hal ini penting untuk mengetahui kesesuaian antara kebijakan dengan praktik di lapangan serta hambatan yang mungkin muncul dalam pelaksanaannya.

Optimalisasi Satresnarkoba tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang dapat menggerakkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan narkoba. Dengan demikian, pemberantasan narkoba menjadi tanggung jawab bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Keberhasilan pemberantasan narkoba akan memberikan dampak positif yang luas, mulai dari peningkatan kualitas hidup masyarakat, penurunan angka kriminalitas, hingga terciptanya lingkungan yang aman dan produktif. Oleh karena itu, upaya ini harus menjadi prioritas utama dalam agenda keamanan dan pembangunan daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam bidang penegakan hukum dan kebijakan narkoba. Hasil kajian dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan bagi Satresnarkoba Polresta Manokwari serta pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan langkah-langkah strategis ke depan.

Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam optimalisasi Satresnarkoba Polresta Manokwari dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba melalui tinjauan strategis dan implementasi kebijakan. Harapannya, hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas dan solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan narkoba di Manokwari.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis optimalisasi Satresnarkoba Polresta Manokwari dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba melalui tinjauan strategis dan evaluasi implementasi kebijakan. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi strategi yang diterapkan Satresnarkoba Polresta Manokwari; (2) menganalisis implementasi kebijakan pemberantasan narkoba; dan (3) mengevaluasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas. Manfaat penelitian terdiri dari aspek teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu kepolisian dan kebijakan publik, khususnya dalam konteks pemberantasan narkoba di wilayah timur Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi Satresnarkoba Polresta Manokwari dalam meningkatkan efektivitas tugas, serta menjadi

referensi bagi pemangku kepentingan terkait dalam penyusunan kebijakan pemberantasan narkoba yang lebih efektif dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi deskriptif yang berlokasi di Satresnarkoba Polresta Manokwari. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai strategi dan kebijakan yang diterapkan dalam pemberantasan narkoba serta efektivitas pelaksanaannya. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak Satresnarkoba Polresta Manokwari dan stakeholder terkait, serta observasi langsung terhadap proses pelaksanaan tugas di lapangan. Sementara data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi, laporan, dan arsip kasus narkoba periode Januari hingga Oktober 2024. Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola, kendala, dan keberhasilan implementasi kebijakan, serta strategi optimalisasi yang sudah dan dapat diterapkan. Dengan metode ini, penelitian bertujuan menghasilkan rekomendasi yang konkret dan aplikatif untuk meningkatkan kinerja Satresnarkoba dalam pemberantasan narkoba di wilayah Manokwari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi yang Diterapkan oleh Satresnarkoba Polresta Manokwari Dalam Upaya Pemberantasan Peredaran Narkoba di Wilayah Hukumnya

Strategi pemberantasan peredaran narkoba yang diterapkan oleh Satresnarkoba Polresta Manokwari mencakup berbagai pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi dan dinamika di lapangan. Mereka mengedepankan langkah awal berupa pemetaan area rawan narkoba yang dilakukan secara sistematis menggunakan data intelijen dan hasil pengamatan. Dengan pemetaan ini, fokus pemberantasan menjadi lebih terarah pada target yang potensial dan efektif. Selain itu, penyusunan rencana operasi secara berkala menjadi bagian dari strategi utama untuk menindak jaringan narkoba yang sudah teridentifikasi. Satresnarkoba juga menaikkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan intensif dan pembelajaran teknologi terbaru agar mampu beradaptasi dengan modus-modus baru para pelaku kejahatan narkoba.

Langkah selanjutnya adalah memperkuat jaringan kerja sama dengan berbagai instansi, mulai dari aparat kepolisian lain, Badan Narkotika Nasional, hingga lembaga-lembaga pemerintahan dan organisasi masyarakat. Koordinasi lintas sektor ini dimanfaatkan untuk memperluas cakupan pengawasan dan penindakan, selain berbagi Intervensi berbasis rumah seperti *home pharmacy care*, sebagaimana dilakukan oleh Utami *et al.* (2021), menunjukkan dampak positif terhadap tekanan darah dan kualitas hidup pasien. Pendekatan ini menempatkan apoteker lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari pasien, memungkinkan monitoring yang lebih personal. Penelitian lain oleh Pratama *et al.* (2020) yang menggunakan metode *Medication Therapy Management* (MTM) juga menghasilkan peningkatan kepatuhan minum obat dan kualitas hidup pasien. Intervensi MTM dikenal mampu mengidentifikasi, mencegah, dan menyelesaikan masalah terkait obat serta mendorong penggunaan obat yang rasional.

Strategi *Brief Counseling* dengan pendekatan 5A (*Assess, Advice, Agree, Assist, dan Arrange*) yang diterapkan dalam penelitian Aryzki *et al.* (2020) dan Ariyani *et al.* (2024) juga

terbukti efektif. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya interaksi dua arah yang mendalam antara apoteker dan pasien, sehingga intervensi menjadi lebih relevan secara personal. Efektivitas pendekatan ini telah didukung oleh berbagai literatur internasional yang menyatakan bahwa model 5A meningkatkan motivasi pasien dalam perubahan perilaku kesehatan.

Pada aspek penindakan, Satresnarkoba mengandalkan operasi berbasis intelijen yang bersifat rahasia dan terukur. Operasi-operasi ini mengedepankan penyergapan dan penggeledahan terhadap jaringan pengedar dan pemilik narkoba, dengan mengedepankan prosedur hukum yang ketat agar bukti dan barang bukti dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Dalam hal ini, penggunaan teknologi juga menjadi sangat penting, seperti pemanfaatan data elektronik, pelacakan komunikasi, serta sistem pengawasan yang terintegrasi. Pendekatan ini memungkinkan proses penindakan lebih cepat, tepat sasaran, dan minim risiko kebocoran informasi.

Selain penegakan hukum, Satresnarkoba Polresta Manokwari juga mengimplementasikan pendekatan humanis terutama kepada pelaku pengguna narkoba. Mereka menyediakan program rehabilitasi dan pendampingan psikososial untuk korban agar memiliki peluang rehabilitasi dan pemulihan yang optimal. Pendekatan ini juga dilengkapi dengan kerjasama bersama lembaga rehabilitasi dan sosial guna memberikan layanan komprehensif bagi pengguna yang ingin keluar dari jeratan ketergantungan. Dengan cara ini, upaya pemberantasan narkoba tidak hanya berorientasi pada penindakan represif tetapi juga mengutamakan aspek penyembuhan dan reintegrasi sosial.

Strategi komunikasi dan transparansi juga mendapat perhatian serius. Satresnarkoba berusaha membangun hubungan yang baik dengan masyarakat melalui berbagai media komunikasi yang terbuka dan informatif. Mereka menginformasikan secara rutin hasil kegiatan pemberantasan narkoba dan perkembangan situasi di wilayahnya, sehingga masyarakat merasa dilibatkan dan mendapatkan kepercayaan untuk mendukung upaya tersebut. Kepercayaan ini sangat penting karena peran serta masyarakat merupakan faktor utama dalam keberhasilan pemberantasan narkoba secara menyeluruh. Satresnarkoba juga membuka kanal pengaduan dan kerjasama yang memudahkan masyarakat melaporkan informasi terkait peredaran narkoba.

Menghadapi tantangan yang dinamis, Satresnarkoba aktif meninjau dan mengevaluasi strategi yang telah berjalan. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas tindakan penindakan, pencegahan, dan rehabilitasi yang telah dilakukan. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian strategi agar lebih adaptif terhadap perkembangan modus baru dan situasi di lapangan. Transparansi dalam evaluasi ini turut meningkatkan kualitas kinerja dan akuntabilitas lembaga, sekaligus menjadi media pembelajaran untuk setiap anggota Satresnarkoba.

Pentingnya pengelolaan data dan informasi juga menjadi perhatian dalam strategi ini. Satresnarkoba mengembangkan sistem manajemen data yang terintegrasi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpan data kasus secara akurat dan up to date. Sistem ini membantu dalam pemetaan risiko, profiling pelaku, serta pengambilan keputusan strategis. Kecepatan dan ketepatan data yang diperoleh membuat proses penanganan kasus dapat berlangsung efisien dan efektif. Integrasi sistem informasi ini juga mempermudah koordinasi antar unit di internal kepolisian dan dengan pihak eksternal.

Satresnarkoba juga memanfaatkan pendekatan komunitas sebagai bagian dari strategi pemberantasan. Mereka menggandeng lembaga kemasyarakatan, tokoh agama, dan komunitas lokal dalam upaya pencegahan dan pengawasan di lingkungan masyarakat. Melalui pendekatan ini, pemberdayaan masyarakat menjadi kunci dalam membangun kepedulian dan pengawasan atas peredaran narkoba yang terjadi. Aktivitas seperti pelatihan kader anti-narkoba dan penyuluhan rutin menjadi sarana membangun sinergi antara aparat dengan masyarakat. Kerja sama ini memperbesar peluang keberhasilan menekan angka peredaran narkoba.

Selanjutnya, Satresnarkoba berinovasi dengan mengembangkan strategi yang berorientasi pada pemberantasan narkoba berbasis teknologi digital. Mereka menggunakan media sosial dan platform digital untuk kampanye anti-narkoba serta mendapatkan informasi intelijen. Penggunaan teknologi informasi juga dimanfaatkan dalam pengawasan dan monitoring yang lebih efektif dan luas. Inovasi ini memungkinkan menjangkau komunitas yang lebih besar dan generasi muda yang sangat aktif dalam dunia digital. Langkah ini memperkuat upaya edukasi dan deteksi dini terhadap potensi bahaya narkoba di masyarakat.

Terakhir, Satresnarkoba selalu menyiapkan mental dan fisik anggota melalui program kesejahteraan dan penguatan mental agar dapat bertugas dengan optimal dan profesional. Mereka memberikan dukungan psikologis dan motivasi agar anggota memiliki semangat tinggi dalam menjalankan tugas yang penuh risiko ini. Dengan anggota yang kuat secara mental dan profesional, efektivitas pelaksanaan strategi pun meningkat. Kesiapan ini sangat penting dalam menjaga konsistensi dan komitmen pemberantasan narkoba di wilayah hukum Polresta Manokwari.

Implementasi Kebijakan Pemberantasan Narkoba Oleh Satresnarkoba Polresta Manokwari Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Efektivitas Pelaksanaannya

Implementasi kebijakan pemberantasan narkoba oleh Satresnarkoba Polresta Manokwari dilakukan secara terstruktur dan menyeluruh, melibatkan berbagai langkah mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Tahap awal implementasi adalah sosialisasi dan edukasi terkait kebijakan kepada seluruh anggota dan pihak terkait agar pemahaman dan komitmen terhadap kebijakan dapat terjaga. Selanjutnya, Satresnarkoba melaksanakan operasi penindakan berdasarkan data intelijen yang diperoleh secara rinci, menjamin penindakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaan kebijakan, penerapan teknologi menjadi sangat penting sebagai alat bantu untuk mempercepat pengumpulan informasi dan pelacakan jaringan peredaran narkoba. Pelaksanaan rehabilitasi bagi pelaku pengguna narkoba juga merupakan bagian dari kebijakan yang dijalankan secara intensif, dengan tujuan memberikan kesempatan kedua bagi para korban narkoba. Evaluasi berkala menjadi bagian yang tidak terpisahkan guna memastikan kebijakan berjalan efektif dan dapat diperbaiki sesuai kebutuhan.

Faktor utama yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan adalah kualitas sumber daya manusia yang melaksanakan kebijakan tersebut. Satresnarkoba Polresta Manokwari menempatkan perhatian besar pada pelatihan dan pengembangan kemampuan anggota agar mampu bekerja secara profesional dan adaptif terhadap perubahan modus kejahatan narkoba. Kemudian, dukungan dari institusi terkait dan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan ini. Koordinasi dan sinergi antar lembaga penegak hukum, lembaga pemerintah, serta komunitas masyarakat memperkuat jaringan pengawasan dan penindakan. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, seperti teknologi informasi dan peralatan operasional, juga sangat menentukan kemampuan Satresnarkoba dalam menjalankan tugasnya secara optimal. Faktor terakhir yang berperan adalah komitmen dan kedisiplinan anggota dalam menjalankan kebijakan sesuai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.

Secara administratif, implementasi kebijakan didukung oleh sistem manajemen yang jelas dan terdokumentasi dengan baik sehingga setiap langkah pelaksanaan dapat dipantau dan dievaluasi. Penentuan target dan pengukuran capaian dilakukan dengan indikator yang terukur untuk memastikan hasil yang optimal. Penggunaan teknologi digital, seperti aplikasi pelaporan daring dan basis data kasus, mempermudah koordinasi dan transparansi dalam pelaksanaan kebijakan. Namun, kendala teknis seperti keterbatasan akses teknologi di beberapa wilayah menjadi tantangan tersendiri yang harus diatasi agar pelaksanaan bisa merata. Selain itu, aspek hukum dan regulasi turut memberikan dampak pada proses implementasi, terutama terkait prosedur penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Penerapan kebijakan harus sejalan dengan prinsip hukum yang berlaku agar hasil dari penindakan tidak diragukan kelengkapan dan keadilannya.

Budaya organisasi dalam Satresnarkoba juga berperan sebagai faktor penentu efektivitas pelaksanaan kebijakan. Budaya yang mengedepankan profesionalisme, integritas, dan inovasi mendorong anggota untuk bekerja dengan semangat tinggi serta tanggung jawab. Upaya membangun sikap kekompakan dan solidaritas antar anggota menjadi pondasi dalam menghadapi tantangan pemberantasan narkoba. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas membuat anggota merasa turut bertanggung jawab atas keberhasilan program. Dalam sisi lain, dukungan psikologis dan kesejahteraan anggota menjadi perhatian agar mereka tetap stabil secara mental dan fisik, mengingat tugas ini menuntut kesiapan menghadapi tekanan dan risiko tinggi. Budaya ini tentunya berpengaruh besar terhadap konsistensi dan keberlangsungan implementasi kebijakan.

Tantangan geografis dan sosial di wilayah hukum Polresta Manokwari juga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Kondisi geografis yang terdiri dari daerah terpencil dan sulit dijangkau menjadi hambatan dalam melakukan pengawasan dan penindakan langsung. Selain itu, keragaman sosial budaya masyarakat memerlukan pendekatan yang berbeda sesuai karakteristik lokal agar kegiatan pencegahan dan edukasi bisa diterima dan efektif. Adanya stigma dan ketakutan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan narkoba juga menjadi penghambat yang harus diatasi melalui pendekatan kemitraan dan keterbukaan. Satresnarkoba perlu mengenali kondisi sosial ini untuk menyesuaikan strategi dan metode kerja supaya kebijakan bisa berjalan dengan lancar. Oleh sebab itu, pemahaman konteks lokal sangat dibutuhkan dalam implementasi kebijakan.

Kebijakan pemberantasan narkoba perlu didukung dengan regulasi yang mendukung dan sinergi antar sektor, termasuk koordinasi dengan lembaga kesehatan dan sosial. Penanganan kasus narkoba tidak hanya berfokus pada aspek hukum tetapi juga aspek rehabilitasi dan pencegahan yang bersifat multisektoral. Implementasi kebijakan yang berjalan optimal harus melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan lembaga pendidikan, sehingga upaya penanggulangan narkoba menjadi komprehensif. Keselarasan kebijakan nasional dan daerah juga penting agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang dan tugas. Oleh karena itu, Satresnarkoba harus berperan aktif dalam fasilitasi kolaborasi lintas sektor untuk mencapai tujuan bersama. Faktor kebijakan makro ini sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan di lapangan.

Aspek pendanaan juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan pemberantasan narkoba. Ketersediaan anggaran yang memadai memungkinkan Satresnarkoba untuk menjalankan seluruh program mulai dari sosialisasi, operasi penindakan, hingga rehabilitasi secara berkelanjutan. Namun, keterbatasan dana dapat membatasi cakupan kegiatan dan inovasi yang bisa dilakukan. Oleh karena itu, pengelolaan dan perencanaan anggaran yang efisien sangat diperlukan agar dana yang tersedia dapat digunakan secara optimal. Satresnarkoba juga mencari sumber pendanaan alternatif dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk memperkuat kesinambungan program. Dengan dukungan dana yang baik, pelaksanaan kebijakan menjadi lebih terarah dan berdampak luas.

Faktor keberlanjutan dan adaptabilitas kebijakan menjadi sangat penting dalam konteks dinamika peredaran narkoba yang cepat berubah. Satresnarkoba harus mampu menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan metoda dan jenis narkoba yang beredar di wilayahnya. Implementasi kebijakan juga harus memperhatikan masukan dari evaluasi sebelumnya dan umpan balik dari masyarakat agar program lebih responsif dan tepat sasaran. Kemampuan untuk berinovasi dan fleksibel dalam menerapkan kebijakan menjadi kunci utama agar pemberantasan narkoba tidak tertinggal dengan modus kejahatan yang terus berkembang. Oleh karena itu, mekanisme review dan revisi kebijakan menjadi bagian integral dari proses implementasi. Kesiapan untuk berubah dan belajar dari pengalaman menjadi faktor penunjang efektivitas pelaksanaan.

Partisipasi aktif masyarakat merupakan satu faktor lagi yang sangat menentukan efektivitas implementasi kebijakan pemberantasan narkoba. Satresnarkoba mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai program kemitraan, pelatihan kader anti- narkoba, dan pengembangan komunitas sadar narkoba. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk keberhasilan pencegahan dan deteksi dini, karena yang mengetahui informasi aktual dan kondisi terdekat di lingkungan adalah warga itu sendiri. Masyarakat yang peduli akan menjadi mata dan telinga aparat kepolisian untuk mengawasi dan melaporkan peredaran narkoba. Oleh karena itu, membangun kepercayaan dan komunikasi dua arah dengan masyarakat menjadi fokus yang tidak boleh diabaikan dalam pelaksanaan kebijakan.

Terakhir, efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah sangat ditentukan oleh kematangan sistem pengawasan dan akuntabilitas dari pelaksana kebijakan itu sendiri. Satresnarkoba melakukan monitoring dan evaluasi secara ketat untuk memastikan integritas pelaksanaan kebijakan dan penggunaan sumber daya yang ada. Pelaksanaan audit internal dan eksternal serta pelaporan hasil kegiatan menjadi sarana untuk transparansi dan pembinaan kinerja. Sistem pengawasan yang kuat juga membantu menekan potensi korupsi dan penyimpangan dalam pelaksanaan program. Dengan demikian, proses implementasi kebijakan pemberantasan narkoba dapat berjalan dengan baik, hasilnya optimal, serta menciptakan kepercayaan publik kepada aparat penegak hukum.

KESIMPULAN

Satresnarkoba Polresta Manokwari menerapkan strategi pemberantasan peredaran narkoba yang komprehensif dan terintegrasi, meliputi tiga aspek utama, yaitu: penegakan hukum yang tegas dan terstruktur, pengembangan intelijen dan penyelidikan yang berbasis teknologi informasi, serta pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Strategi ini dirancang untuk tidak hanya menindak pelaku peredaran narkoba, tetapi juga mengurangi permintaan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba. Sinergi antar lembaga dan keterlibatan aktif masyarakat menjadi pilar penting dalam keberhasilan strategi ini. Implementasi kebijakan pemberantasan narkoba oleh Satresnarkoba Polresta Manokwari berjalan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi yang sistematis. Faktor-faktor yang mendukung efektivitas pelaksanaan antara lain adalah komitmen pimpinan, motivasi personel, sinergi antar lembaga penegak hukum, serta pemanfaatan teknologi intelijen digital. Namun, terdapat pula kendala yang memengaruhi efektivitas, seperti keterbatasan anggaran dan fasilitas operasional, resistensi sebagian masyarakat, serta hambatan koordinasi antar instansi. Data penanganan kasus periode Januari-Oktober 2024 menunjukkan bahwa meskipun terdapat hambatan, operasi gabungan berhasil membongkar jaringan narkoba besar dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaporan aktivitas mencurigakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, S. (2021). *Peran Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru Dalam Mengantisipasi Peredaran Narkoba Di Kota Pekanbaru Tahun 2019-2020*. Universitas Islam Riau.
- Djangoan, T. R., & Dominggus, I. (2021). Strategi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pulau Morotai dalam Melakukan Penanganan dan Pemberantasan Narkoba Didaerah Perbatasan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 7(4), 638–648.
- Haifa, A. H., & Oktaviana, A. Y. (2024). Tantangan Hukum dan Integrasi Sosial Dalam Mengatasi Peredaran Narkoba: Pendekatan Terhadap Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(23), 1140–1145.
- Haspada, D. (2023). Tantangan dan Solusi: Mengatasi Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia. *Journal of Social and Economics Research*, 5(1), 298–310.
- Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan dan Pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 201–210. <https://www.academia.edu/download/112783767/1983.pdf>
- Indou, A. (2022). *Dampak Penerapan Otonomi Khusus Papua Barat Terhadap Orang Asli Papua Dalam Kepemilikan Lapak Di Pasar Wosi Kabupaten Manokwari*. Universitas Nasional.
- Isvany, A. L., Mahka, M. F. R., Wahid, A. I., & Amrullah, A. A. (2024). Peninjauan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia: Tantangan, Dampak, dan Upaya Melindungi Generasi Muda. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7(1), 109–114.
- Lukman, G. A., Alifah, A. P., Divarianti, A., & Humaedi, S. (2022). Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3). <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.36796>
- Marweny, E. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Polisi Yang Terlibat Dalam Peredaran Narkotika (Studi Kasus Peredaran Sabu Teddy Minahasa). *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882*, 2(1), 8–14.
- Nugroho, A. R. H., Wulansari, C. D., & Subiakto, Y. (2025). Analisis Dampak Penyalahgunaan Narkoba Pada Anak Usia Sekolah Terhadap Keamanan Nasional Dalam Persepektif Intelijen. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(4), 1–9.
- Nurmalita, A., & Megawati, S. (2022). Implementasi kebijakan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di Kota. *Publika*, 1111–1122. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/47699>
- Prayugo, W. T., Rohayatin, T., & Ristala, H. (2025). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap. *Praxis Idealis: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 1. <http://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/praxis/article/view/3162>
- Putra, F. A., & Gaol, S. L. (2025). Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas Iia Jakarta Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023). *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan*, 3(1), 188–202.
- Putri Amelia, & Wibowo, P. (2023). Strategi pencegahan penyelundupan narkoba pada lapas dan rutan di Indonesia. *JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin*, 1(3). <https://doi.org/10.59945/jpnm.v1i3.47>
- Rocky Marbun, S. H., Yuherawan, D. S. B., SH, M. S., & Mahmud Mulyadi, S. H. (2021). *Kapita Selekta Penegakan Hukum (Acara) Pidana: Membongkar Tindak Tuturan dan Komunikasi Instrumental Aparat Penegak Hukum dalam Praktik Peradilan Pidana*. Publica Indonesia Utama.
- Sefrika. (2016). Kampanye Pencegahan Narkoba di Kalangan Pelajar dengan menggunakan Animasi Interaktif. *Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika*, 16(02).
- S Gabriella. (2019). Kerja sama Indonesia-Interpol dalam menangani isu penyelundupan narkoba di wilayah perbatasan Indonesia. *Intermestic.Unpad.Ac.Id*, 3, 147. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v3n2.4>
- Tadjoeddin, M. Z., Yumna, A., Gultom, S. E., Rakhmadi, M. F., Hidayat, M. F., & Suryahadi, A. (2017). Ketimpangan dan stabilitas di Indonesia yang demokratis dan terdesentralisasi. *The Smeru Research Institute*.

Ufnia, S. W. S., & Hendrayanti, H. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 3(2), 211–227.